

# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dorak

No. ....

Telp. (0763) 434707 SELATPANJANG

Fax. 434707 Kode Pos. 28753

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR: Ø) / KPTS / XII/ 2013

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA ( SMA Swasta ) MERANTI KECAMATAN MERBAU

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan non formal;
  - b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan:

## Mengingat

- operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

  1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukkan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
- 7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendirian Sekolah;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
- Peraturan Menteri nomo 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
- 12. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/ 182 tanggal 23 Pebruari 1993 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- 13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS: 821.2/VII/2009/005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- 14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah:
- 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- Memperhatikan : 1. Surat Dari Kepala Sungai Tengah Kecamatan Merbau, Nomor 422/Umum/2013/085 tentang Rekomendasi Dukungan Pendirian SMA Swasta
  - 2. Surat Dari UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan, Nomor: 422/Pendd/2013/460 tanggal, 3 Desemberi 2013 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian SMA Swasta Meranti Kecamatan Merbau.
  - Surat dari Camat Merbau Nomor: 420/Pendidikan/XII/2013/ Desember 2013 Tentang Rekomendasi SMA Swasta Meranti Kecamatan Merbau.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Swasta (SMA Swasta ) Meranti untuk mendirikan Sekolah Menengah SMA Swasta ( SMA Swasta ) Meranti yang berlokasi di jalan Lintas Sungai Tengah RT.01/ RW. 02 Desa Sungai Tengah Kecamatan Merbau;

Kedua

Kepada Yayasan Darul Madani Al Riaui, sebagai pengelola lembaga Pedidikan tersebut agar melaksanakan:

- Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan Fungsional yang ditetapkan;
- Pengadaan Lembaga Pengajar sesuai dengan kebutuhan Pendidikan;
- Kurikulum Pendidikan Menengah yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan ranah Kognitif, Efektif, Psikomotorik serta Minat dan Baka, Kreatifitas siswa;
- Mengingat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat bersatu padu mengambil langkah-langkah untuk memeratakan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu, diharapkan pihak Yayasan dapat memberi peluang yang sama dan tidak diskriminatif dalam perekrutan pelajar /murid;

Ketiga

: Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sampai dengan 23 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

> DITETAPKAN DI : SELATPANJANG PADA TANGGAL: 23 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidkan Dan Kebudayaan Kabupaten Kabulauan Meranti

> Drs. BAKHTIAR.MP Pembina Utama Muda NIP.19550710 198403 1 005.

## TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

- Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
- 2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Merbau.